

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab. I pada tesis merupakan pendahuluan penelitian yang secara garis besar didalamnya mencakup latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Hal ini merupakan kegiatan yang melibatkan pemberian bantuan dan tuntunan kepada individu pada umumnya, yang berfokus pada siswa. Dalam ranah pendidikan, bimbingan dan konseling sangat penting, karena bertujuan untuk meningkatkan perkembangan individu secara keseluruhan. Guru, termasuk guru bimbingan konseling (BK), memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan kegiatan bimbingan dan konseling ke dalam tugas mereka.

Sebagai pendidik, guru BK memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh dalam menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling untuk sekelompok siswa. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dirancang untuk membantu siswa dalam berbagai aspek, seperti pembentukan identitas, penyesuaian terhadap lingkungan, dan perencanaan masa depan mereka, sehingga dapat berkembang secara optimal.

Pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Borders & Drury (1992) menekankan bahwa intervensi bimbingan dan konseling memiliki dampak substansial terhadap perkembangan pribadi dan pendidikan siswa. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa hasil pendidikan yang optimal tidak hanya bergantung pada bimbingan dan konseling semata, tetapi keberadaan layanan tersebut memiliki peran signifikan dalam keseluruhan lingkungan pendidikan di sekolah. Upaya untuk memfasilitasi perkembangan siswa sebaiknya dilakukan secara sinergis antara pendekatan pembelajaran dan pendekatan bimbingan dan konseling.

**Siti Fety Fatimah, 2024**

*Efektivitas Accountability Bridge Model Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Guru bimbingan konseling dituntut profesional dalam mengerjakan pelayanan konseling kepada kliennya. Hal ini dilakukan dalam wujud motivasi altruistik yang dimiliki guru bimbingan konseling tersebut. Guru bimbingan konseling dihadapkan pada keadaan dimana ia harus bersikap profesional dalam situasi menghadapi kliennya. Guru bimbingan konseling harus menjalankan layanan yang ada di dalam BK dengan profesional.

Tugas utama guru BK adalah melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa asuhnya. Seberapa besar keberhasilan yang dicapai guru BK dalam melaksanakan kegiatan di sekolah sekaligus pula dijadikan sebagai tolak ukur akan kemampuannya dalam melaksanakan peran di sekolah. Untuk itu, seluruh perencanaan BK, pelaksanaan BK, dan evaluasi BK harus disusun sedemikian rupa oleh guru BK dan tidak terlepas koordinasi dengan personal sekolah lainnya agar tujuan di sekolah tersebut tercapai.

Maka dari itu guru bimbingan dan konseling untuk memenuhi tuntutan menjadi guru BK yang baik atau profesional maka diperlukan program terlebih dahulu. Menurut Suherman (2011) Program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah disusun berdasarkan pedoman pada kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing sekolah. Pedoman tersebut dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan layanan Bimbingan dan konseling, dan disusun untuk menjadi pegangan bagi para pelaksana program.

Program layanan bimbingan dan konseling diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program bimbingan dan konseling sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat pengembangan dalam tujuannya (*comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature*) (Bowers & Hatch, 2000).

Guru bimbingan dan konseling di Indonesia harus memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan praktik akuntabilitas, seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan akuntabilitas

di antaranya adalah: menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; melakukan evaluasi proses, hasil, dan program bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling, serta menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Guru bimbingan dan konseling harus aktif mencari, menambah, dan menggali pengetahuan yang diperlukan dengan mengikuti lokakarya, seminar, pelatihan kompetensi dan sumber lain yang dapat meningkatkan keterampilan guru bimbingan dan konseling dan berimplikasi pada kinerja guru bimbingan dan konseling serta akuntabilitasnya di sekolah. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling harus mampu menyediakan data hasil kinerja karena semua kegiatan dan tindakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa harus berbasis bukti. Guru bimbingan dan konseling harus mampu menyediakan data tentang efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam mengubah siswa, dan membuktikan bahwa perubahan positif siswa merupakan dampak dari bimbingan dan konseling yang telah diberikan guru bimbingan dan konseling.

Efektivitas program bimbingan dan konseling serta intervensi sekolah yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memenuhi tujuan program harus didokumentasikan melalui praktik akuntabilitas yang sistematis dan berkelanjutan. Meskipun banyak diskusi tentang pentingnya akuntabilitas guru bimbingan dan konseling, namun belum jelas sejauh mana guru bimbingan dan konseling kontemporer berpartisipasi dalam praktik akuntabilitas dan bagaimana bentuk dari praktik akuntabilitas tersebut. Definisi akuntabilitas juga telah berubah sejak tahun 1990. Pada tahun 1990, guru bimbingan dan konseling berpikir bahwa data pencacahan, menghitung jumlah sesi atau aktivitas layanan bimbingan dan konseling, menunjukkan akuntabilitas. Saat ini, selain kegiatan yang guru bimbingan dan konseling lakukan setiap hari, guru bimbingan dan konseling juga harus menunjukkan bagaimana kegiatan tersebut menghasilkan perubahan atau dampak yang berarti bagi siswa. Dengan demikian, perlu adanya penegasan bahwa pengembangan diri yang dimiliki siswa benar merupakan hasil dari siswa tersebut

memperoleh layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau terjadi karena faktor-faktor lainnya.

Akuntabilitas merupakan masalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kedua aspek tersebut relevan dengan program bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling yang profesional memiliki tanggung jawab terhadap sistem akuntabilitas yang dirancang dengan baik. Guru bimbingan dan konseling menginginkan umpan balik atas pekerjaan mereka dan selanjutnya untuk dapat melakukan modifikasi jika diperlukan atau mempertahankan tindakan yang terbukti berhasil. Bertanggung jawab atas kinerja, pelaksanaan program dan hasil merupakan definisi dari akuntabilitas (ASCA, 2005).

Penggunaan data dan tindakan akuntabilitas yang kredibel akan memberikan manfaat tidak hanya dapat mengadvokasi posisi dan program bimbingan dan konseling, tetapi juga guru bimbingan dan konseling mendapatkan keterampilan dalam pengembangan profesional mereka (Stone & Dahir, 2007). Dengan kata lain, akuntabilitas dapat mendukung usaha guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling sekolah yang komprehensif. Komponen penting dari akuntabilitas adalah pengumpulan dan analisis data.

Muhammad Yuliansyah, dkk (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan BK di Indonesia, secara historis telah jauh mengukuhkan eksistensinya sebagai salah satu pelayanan profesional di masyarakat. Selain itu, yang perlu dicermati adalah naik turunnya pelayanan BK di Indonesia memberikan indikasi bahwa persoalan akuntabilitas masih perlu digarap secara serius agar pelayanan dapat tampil benar-benar profesional.

Akuntabilitas sebagai pendokumentasian efektivitas melalui pengukuran hasil kegiatan profesional, oleh karena itu diperlukan kegiatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling karena melalui kegiatan ini dapat dilihat program-program yang telah disusun dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan juga dapat dilihat faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang dapat dievaluasi untuk kegiatan tahun berikutnya, Muhammad Yuliansyah, dkk (2021)

Hasil penelitian Rhyne-Winkler & Wooten (1996) mengemukakan bahwa

guru BK/konselor sekolah melaksanakan layanan berkualitas untuk meningkatkan kinerja akademik siswa. Namun, konselor gagal mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan bukti keefektifannya. Selanjutnya, Topdemir (2010) mengemukakan meskipun guru BK/konselor sekolah menyadari pentingnya menerapkan langkah-langkah akuntabilitas dan praktik yang disengaja, karena keterbatasan waktu, kebingungan peran, dan variabel lainnya, praktik ini jarang digunakan oleh guru BK/konselor sekolah daripada yang seharusnya. Sementara, saat ini, guru BK/konselor sekolah ditantang untuk menunjukkan efektivitas program konseling sekolah mereka dalam hal terukur dan menggunakan strategi akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja siswa dan menutup kesenjangan prestasi (Young & Kaffenberger, 2011).

Data akuntabilitas memberikan bukti kepada stakeholder bahwa program bimbingan dan konseling sekolah membuat perbedaan (membawa perubahan) dalam prestasi belajar siswa. Ketika guru bimbingan dan konseling menghasilkan laporan yang menguraikan dampak langsung program bimbingan dan konseling terhadap prestasi siswa, guru bimbingan dan konseling memperkuat posisi mereka sebagai bagian integral dari keseluruhan tujuan sekolah. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling sangat perlu menerapkan akuntabilitas yang kredibel dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sehingga dapat menjadi guru bimbingan dan konseling yang akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan bukti keberhasilan program pelayanan bimbingan dan konseling. Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena pada kenyataannya di sekolah masih banyak guru BK yang belum memahami cara membuat program, kurangnya pemahaman guru BK dalam mengolah data hasil asesmen untuk bisa dijadikan sebuah program layanan bimbingan dan konseling sehingga program tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa kebutuhan guru bimbingan dan konseling untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi sangat tinggi, akan tetapi masih banyak guru bimbingan dan konseling yang sulit untuk

melakukannya dengan berbagai alasan. Seperti dikemukakan Mujiyati, dkk., (2020) alasan guru bimbingan dan konseling tidak melaksanakan evaluasi program adalah munculnya anggapan bahwa kegiatan evaluasi adalah berat dan sulit, kurangnya pelatihan, kurangnya finansial, dan sumber daya manusia, kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran, dan sumber daya manusia, kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran dan adanya kekhawatiran dari konsekuensi-konsekuensi negatif dari evaluasi tersebut.

Pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling khususnya layanan dasar yang rendah di sekolah mengakibatkan kepercayaan stakeholder terhadap program bimbingan dan konseling menjadi rendah (Badrojaman, dkk 2015) Fenomena tidak adanya jadwal layanan bimbingan dan konseling di kelas merupakan indikasi rendahnya dukungan kepala sekolah terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling belum dapat memberikan keyakinan kepada siswanya mengenai pentingnya program bimbingan dan konseling (Husna, 2002; Pancanita, 2008) Bahkan menurut Buchori, di beberapa sekolah, guru bimbingan dan konseling dijauhi siswanya karena dipandang sebagai "polisi sekolah" Rendahnya kepercayaan terhadap program bimbingan dan konseling juga terjadi pada guru mata pelajaran yang seringkali memiliki persepsi yang kurang baik pada guru bimbingan dan konseling, tidak jarang program bimbingan dan konseling hanya merupakan komponen pelengkap di sekolah sebagai persyaratan administrasi sekolah saja (Buchori, 2001).

Hasil studi pendahuluan pada SMK di Cianjur menunjukkan bahwa kontributor yang signifikan terhadap minat guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan evaluasi adalah kurangnya model evaluasi program praktis yang tersedia bagi guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kebingungan tentang perbedaan antara evaluasi program dan akuntabilitas muncul untuk menghambat guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan evaluasi program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan model bagi guru bimbingan dan konseling yang secara jelas mengkonsep evaluasi program dan akuntabilitas yang memberikan dukungan untuk menetapkan evaluasi program sebagai standar praktik dalam bimbingan dan konseling Selain itu, model evaluasi

akuntabilitas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melihat kondisi seperti ini, maka perlu dikembangkan sebuah model evaluasi yang mampu memenuhi kebutuhan evaluasi guru bimbingan dan konseling di sekolah, salah satu model evaluasi yang dapat dikembangkan adalah *accountability bridge model*.

*Accountability bridge model* merupakan model evaluasi yang didesain untuk membantu guru bimbingan dan konseling merencanakan, menerapkan dan asesmen atau menilai keefektifan dan pengaruh layanan program bimbingan dan konseling yang dilakukan. *Accountability bridge model* merupakan kerangka kerja yang dapat membantu memfasilitasi guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi program dan mengkomunikasikan hasil (Astramovich dan Coker, 2007).

Hasil penelitian Whiston (Astramovich & Hoskins, 2013) menyatakan bahwa *accountability bridge model* efektif untuk evaluasi program bimbingan dan konseling serta dapat digunakan dalam evaluasi perbaikan program pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem yang lebih difokuskan pada komponen evaluasi, yang meliputi komponen kebutuhan dan *feasibility*. Panduan untuk mengevaluasi akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh *American School Counselor Association* (ASCA, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan *accountability bridge model* terhadap pelaksanaan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah merupakan topik yang layak diteliti.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Begitu juga dengan profesi guru bimbingan dan konseling yang membutuhkan tanggung jawab atas kinerjanya di sekolah. Guru bimbingan dan konseling harus akuntabel dalam menjalankan peran dan tugasnya di sekolah. Meskipun demikian, sebagian besar guru bimbingan dan

konseling di sekolah khususnya pada SMK Negeri di Cianjur belum memasukkan praktik akuntabilitas dalam program mereka.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya kinerja akuntabilitas guru bimbingan dan konseling pada SMK Negeri di Cianjur. Kinerja akuntabilitas sangat berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Beberapa alasan guru bimbingan dan konseling menghindari aktivitas akuntabilitas, yaitu antara lain: guru bimbingan dan konseling tidak mengumpulkan data akuntabilitas karena takut di evaluasi dan konsekuensi negatif terhadap hasil pekerjaannya; kurangnya pelatihan guru terkait dengan pengukuran; kurangnya sumber daya keuangan dan manusia, kendala waktu; tidak mengetahui kriteria yang harus diukur. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga berpikir bahwa aktivitas akuntabilitas terlalu rumit dan sulit, tidak tahu dari mana untuk memulai atau mengakhiri, guru bimbingan dan konseling merasa kurang percaya terhadap kemampuannya untuk melaksanakan evaluasi, kurangnya pemahaman personil sekolah tentang tugas pokok dan fungsi guru bimbingan dan konseling di sekolah, dan kurangnya dukungan sistem sehingga menyebabkan kinerja akuntabilitas tidak berjalan dengan baik.

Kegagalan implementasi akuntabilitas banyak ditentukan oleh rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas, penurunan nilai-nilai normal, faktor budaya, rendahnya kualitas petugas/pejabat, krisis lingkungan, kelemahan hukum tentang akuntabilitas, usangnya teknologi, dan rendahnya standar hidup masyarakat (Thopedmir, 2009).

Berdasarkan pemaparan di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan akuntabilitas bimbingan dan konseling yang menyebabkan lemahnya kinerja akuntabilitas bimbingan dan konseling di sekolah.

Kondisi ini mengisyaratkan perlunya dikembangkan model evaluasi program bimbingan dan konseling yang dapat mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan *accountability bridge model*. Alasan penggunaan model karena keberhasilan guru bimbingan dan konseling dalam mengkomunikasikan data hasil evaluasi kepada stakeholders merupakan indikator dari akuntabilitas. Guru bimbingan dan konseling yang akuntabel dalam menjalankan tugasnya di sekolah

mempunyai pengalaman dan wawasan terkait pembuatan program, pelaksanaan layanan dan evaluasi.

Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kinerja akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMK di Cianjur?
2. Bagaimana kerangka kerja *accountability bridge model* yang diterapkan SMK Negeri Kabupaten Cianjur?
3. Apakah *accountability bridge model* efektif dalam meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMK Negeri Kabupaten Cianjur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menguji sebuah model yang secara empiris efektif untuk meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah. Secara operasional, tujuan umum penelitian ini dirinci ke dalam tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran karakteristik tentang pelaksanaan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling sekolah di SMK Negeri Kabupaten Cianjur.
2. Memperoleh *accountability bridge model* yang tepat diterapkan guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri Kabupaten Cianjur.
3. Mengetahui efektivitas *accountability bridge model* dalam meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling sekolah di SMK Negeri Kabupaten Cianjur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, kebijakan, maupun praktik bimbingan dan konseling. Manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Manfaat dari segi pengembangan teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan terhadap pelaksanaan akuntabilitas bimbingan dan

konseling di sekolah, serta dapat menjadi salah satu referensi bagi guru bimbingan dan konseling/guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan dan mengimplementasikan evaluasi program bimbingan dan konseling dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai guru bimbingan dan konseling yang profesional.

2. Manfaat dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi stakeholder dalam mengambil keputusan dan sebagai pertimbangan bagi penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling serta penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
3. Manfaat bagi praktik bimbingan dan konseling, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif terhadap sudut pandang atau solusi dalam memecahkan masalah akuntabilitas guru bimbingan dan konseling di sekolah dengan berbasis bukti dan data, serta memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.